



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 61/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/05/2012

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/05/2012 tentang Penghapusan Dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan bermotor termasuk 2 (dua) unit kendaraan dengan nomor polisi B1327MQ dan B1173MQ;
 - b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang nomor 233/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah dilaksanakan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan terdapat 2 (dua) unit kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a gagal lelang karena tidak ada peminat/peminat mengundurkan diri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan lelang ulang atas kendaraan dimaksud;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-460/WKN.07/2013 tanggal 3 April 2013, untuk melaksanakan lelang ulang atas kendaraan dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/05/2012 tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu mengubah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/05/2012 tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2013 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Mengubah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/05/2012 tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Membukukan/mencatat kembali 2 (dua) unit kendaraan dengan nomor polisi B1327MQ dan B1173MQ yang gagal lelang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Menghapuskan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan penjualan secara lelang ulang terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2013

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/04/2013
TANGGAL 30 APRIL 2013

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHAPUSKAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG

No.	NAMA BARANG	JENIS	NO. POLISI	NUP	TAHUN	VOLUME	KONDISI	HARGA PEROLEHAN	HARGA LIMIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
Kendaraan Roda 4 (empat)									
1.	T Kijang KF.50	Minibus	B 8739 ER	8	1993	1	RB	Rp 16.225.000	Rp 13.913.250
2.	T Kijang KF.40	Minibus	B 2544 HQ	16	1995	1	RB	Rp 45.000.000	Rp 31.310.000
3.	T Kijang KF.80	Minibus	B 2528 KQ	24	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 44.667.500
4.	T Kijang KF.80	Minibus	B 2529 KQ	32	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 50.267.500
5.	T Kijang KF.80	Minibus	B 2530 KQ	30	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 50.267.500
6.	T Kijang KF.80	Minibus	B 2531 KQ	29	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 50.267.500
7.	T Kijang	Minibus	B 1125 KQ	21	1997	1	RB	Rp 47.150.000	Rp 50.267.500
8.	T Kijang	Minibus	B 2221 KQ	25	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 53.067.500
9.	T Kijang KF.80	Minibus	B 1744 HQ	33	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 50.267.500
10.	T Kijang KF70	Minibus	B 7004 EQ	38	1997	1	RB	Rp 54.200.000	Rp 55.085.000
11.	T Kijang	Minibus	B 7044 EQ	39	1997	1	RB	Rp 89.000.000	Rp 50.267.500
12.	T. Kijang KF.83	Minibus	B 1191 PQ	44	2000	1	RB	Rp 111.600.000	Rp 96.142.500
13.	T Kijang KF.83	Minibus	B 1190 PQ	43	2000	1	RB	Rp 111.600.000	Rp 85.132.500
14.	T Kijang KF.83	Minibus	B 1192 PQ	42	2000	1	RB	Rp 111.600.000	Rp 84.367.500
15.	T Kijang KF.83	Minibus	B 1752 AX	123	2000	1	RB	Rp 114.500.000	Rp 96.142.500
16.	T Kijang SSX	Minibus	B 1266 PQ	50	2000	1	RB	Rp 173.250.000	Rp 121.350.000
17.	T Kijang	Mobil Box	B 9719 KQ	1	2000	1	RB	Rp 47.500.000	Rp 18.225.000
18.	Suzuki Sidekick	Jeep	B 2077 HQ	7	1996	1	RB	Rp 50.200.000	Rp 36.852.500
19.	Suzuki Katana	Jeep	B 2958 HQ	9	1996	1	RB	Rp 36.800.000	Rp 28.017.500

No.	NAMA BARANG	JENIS	NO. POLISI	NUP	TAHUN	VOLUME	KONDISI	HARGA PEROLEHAN	HARGA LIMIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
20.	Daihatsu Taruna	Jeep	B 1171 MQ	14	1999	1	RB	Rp 63.100.000	Rp 47.487.500
21	Daihatsu Taruna	Jeep	B 1172 MQ	15	1999	1	RB	Rp 63.100.000	Rp 47.487.500
Kendaraan Roda 2 (dua)									
1.	Yamaha RXK	Spd Motor	B 8412 EA	40	1992	1	RB	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000
2.	Yamaha RX	Spd Motor	B 4025 HQ	41	1995	1	RB	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
3.	Yamaha RXS	Spd Motor	B 5689 FQ	42	1995	1	RB	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
4.	Yamaha RX	Spd Motor	B 4532 EQ	8	1997	1	RB	Rp 5.800.000	Rp 3.018.250
5.	Honda	Spd Motor	B 5220 HQ	2	1996	1	RB	Rp 5.100.000	Rp 1.887.000
6.	Honda	Spd Motor	B 5687 HQ	5	1996	1	RB	Rp 4.600.000	Rp 3.127.650
Total								Rp1.489.025.000	Rp. 1.182.386.150

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIBUKUKAN/DICATAT DALAM DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA**

No.	NAMA BARANG	JENIS	NO. POLISI	NUP	TAHUN	VOLUME	KONDISI	HARGA PEROLEHAN	HARGA LIMIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Opel Blazer	Minibus	B 1327 MQ	40	1999	1	RB	Rp 120.000.000	Rp 43.998.500
2.	Daihatsu Taruna	Jeep	B 1173 MQ	16	1999	1	RB	Rp 63.100.000	Rp 47.487.500
								Rp 183.100.000	Rp 91.486.500

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

- 1 -
Emmy Suparmiatun